

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

VISI : WAY KANAN UNGGUL DAN SEJAHTERA

RPJM				RENSTRA						
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1,1 Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi							Sekretariat Daerah
		1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	poin	63,64	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
					1 Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD		Nilai SAKIP OPD (Setdakab)	poin	80,2	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan)
						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	%	100	Asisten Administrasi Umum
						Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan	%	100	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Sub Kegiatan :				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	%	100	Asisten Administrasi Umum
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Sub Kegiatan :				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	4.592	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Sub Kegiatan :				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Laporan SKPD	%	100	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Sub Kegiatan :				

RPJM				RENSTRA						
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	laporan	2	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan
		1.1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	1.1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	point	9,30	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
					1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan	point	88,5	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
						<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan perangkat daerah dengan Nilai IKM Baik	%	85	Asisten Administrasi Umum
						<b>Kegiatan</b> : Penataan Organisasi	Cakupan Perangkat Daerah yang di Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	%	100	Kepala Bagian Organisasi
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi
					2 Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah		Persentase Produk Hukum yang harmonis	%	100	
						<b>Program</b> : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan penyusunan produk hukum yang dikoordinasikan	%	100	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						<b>Kegiatan</b> : Fasilitas dan koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum dalam JDIH	%	100	Kepala Bagian Hukum
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		724	Analisis Kebijakan Muda Bagian Hukum
						<b>Kegiatan</b> : Fasilitas dan koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang di fasilitas	%	100	Kepala Bagian Hukum
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		724	Ahli Muda Perancang Peraturan Per- UU-an
						<b>Kegiatan</b> : Fasilitas dan koordinasi Hukum	Persentase penanganan kasus yang di tangani	%	100	Kepala Bagian Hukum
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	kasus	8	Ahli Muda Analisis Hukum
		1.1.6 Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	1.1.6 Meningkatnya Kinerja Organisasi			Nilai Komponen Kinerja Organisasi	point	6,45	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
					1 Kematangan Perangkat Daerah		Indeks Kematangan Perangkat Daerah	point	50	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
						<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan perangkat daerah dengan indeks kematangan perangkat daerah Baik	%	100	Asisten Administrasi Umum
						<b>Kegiatan</b> : Penataan Organisasi	Cakupan Perangkat Daerah yang menyampaikan LKJ Tepat Waktu	%	100	Kepala Bagian Organisasi

RPJM				RENSTRA								
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	8			Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi
						<b>Kegiatan :</b> Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	%	100			Kepala Bagian Organisasi
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8			Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi
						<b>Kegiatan :</b> Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat Ukuran dan Fungsi	%	95			Kepala Bagian Organisasi
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	12			Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi
					2	Meningkatnya pelayanan kerumah tanggaaan dan kegiatan bupati, wakil bupati dan rumah tangga sekretariat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumah tanggaaan dan kegiatan bupati, wakil bupati dan rumah tangga sekretariat daerah sesuai rencana	%	100			Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan untuk menunjang kegiatan kerumah tanggaaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah	%	100			Asisten Administrasi Umum
						<b>Kegiatan :</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100			Kepala Bagian Umum
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	16			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	8			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	laporan	4			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						<b>Kegiatan :</b> Administrasi Kepegawaian PD	Cakupan pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100			Kepala Bagian Umum
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	800			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1400			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	8			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	8			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	60			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	20			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	20			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	8			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60			Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum

RPJM				RENSTRA				
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	Kasubbag TU Pimpinan Bagian Umum
				<b>Kegiatan</b> : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	Kepala Bagian Umum
				<b>Sub Kegiatan</b> :				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	48	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	80	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	16	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				<b>Kegiatan</b> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	Kepala Bagian Umum
				<b>Sub Kegiatan</b> :				
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	16	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	320	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	2	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	unit	12	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	80	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	3	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit	3	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulan	3	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum

RPJM				RENSTRA						
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	200	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					<b>Kegiatan</b> : Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah	%	100	Kepala Bagian Umum	
					<b>Sub Kegiatan</b> :					
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					<b>Kegiatan</b> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	Kepala Bagian Umum	
					<b>Sub Kegiatan</b> :					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	400	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	240	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	240	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit	240	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	400	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	40	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	40	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	32	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	240	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Umum	
					<b>Kegiatan</b> : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	
					<b>Sub Kegiatan</b> :					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	orang	112	Kasubag TU Pimpinan	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	paket	80	Kasubag TU Pimpinan	
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	Kasubag TU Pimpinan	
					<b>Kegiatan</b> : Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	%	100	Kepala Bagian Umum	

RPJM				RENSTRA								
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	48			
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	48			
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	48			
						<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan untuk menunjang Kegiatan Pimpinan	%				Asisten Administrasi Umum
						<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah yang membutuhkan sambutan/bahan rapat	%				Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	laporan	48			Analisis Kebijakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
						Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	48			Kasubag Protokol
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	laporan	48			Analisis Kebijakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					3 Meningkatnya Kinerja Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	poin	3,70			Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
						<b>Program :</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan perangkat daerah yang melaporkan indikator EKPPD tepat waktu	%	100			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						<b>Kegiatan :</b> Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Indikator EKPPD Yang laporan tepat waktu	%	100			Kepala Bagian Tata Pemerintahan
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi D	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4			Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan
						<b>Kegiatan :</b> Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Indikator Kinerja SPM Yang Tercapai	%	100			Kepala Bagian Tata Pemerintahan
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi D	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4			Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan
						<b>Kegiatan :</b> Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Batas Wilayah yang telah diselesaikan	%	100			Kepala Bagian Tata Pemerintahan
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	4			Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan
						<b>Kegiatan :</b> Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Kecamatan yang di Fasilitasi Administrasinya	%	100			Kepala Bagian Tata Pemerintahan
						<b>Sub Kegiatan :</b>						
						Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4			Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan
					4 Terbangunnya sinergi penanggulangan kemiskinan dengan berbagai pihak		Cakupan penanggulangan kemiskinan yang dapat di monitoring dan di evaluasi	%	100			
						<b>Program :</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dimonitoring	%	100			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB yang di monitoring	%	100			Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
						<b>Sub Kegiatan :</b>						

RPJM				RENSTRA						
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas yang di monitoring	%	100	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum	Dokumen	12	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	750	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	750	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat
						<b>Program</b> : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dimonitoring	%	100	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Bina Mental Spiritual yang di fasilitasi	%	100	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat
					5	Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga	Persentase Capaian Kerjasama pendidikan tinggi/ vokasi, perbankan, BUMN, BUMD, Perusahaan	%	100	
						<b>Program</b> : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan kerjasama pihak ketiga yang dikoordinasikan	%	100	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						<b>Kegiatan</b> : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Capaian Kerjasama Instansi Vertikal/ Pendidikan Tinggi/ Vokasi/Perbankan/ Perusahaan yang Difasilitasi	%	100	Kepala Bagian Kerjasama
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kerjasama
						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kerjasama
						Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kerjasama
					6	Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	Persentase Rekomendasi TEPRAs yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait	%	80	
						<b>Program</b> : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah yang dikoordinasikan	%	100	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						<b>Kegiatan</b> : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH	%	100	Kepala Bagian Kerjasama
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Kerjasama
					7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi TEPRAs yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait	%	100	

RPJM				RENSTRA						
						<b>Program</b> : Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan yang dikoordinasikan	%	100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan	%	100	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	80	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Program Pembangunan yang di monitor	%	100	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan
						<b>Program</b> : Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kemajuan Penyelenggaraan Program Strategis Daerah/ Program Unggulan Bupati	%	100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	%	100	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	384	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan
					8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa		Nilai Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	point	71	
						<b>Program</b> : Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ	%	100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pelayanan yang difasilitasi	%	100	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	184	Ahli Muda Pengelola Barang/ Jasa
						<b>Kegiatan</b> : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pelayanan administrasi pengadaan barang / jasa	%	100	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	Ahli Muda Pengelola Barang/ Jasa
						<b>Kegiatan</b> : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang/ jasa secara elektronik	%	100	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	Ahli Muda Pengelola Barang/ Jasa
					9 Meningkatkan Pemantauan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi dan Air		Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi dan air yang ditindaklanjuti oleh OPD	%	100	
						<b>Program</b> : Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumberdaya Alam	%	65	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	100	Kepala Bagian Administrasi SDA
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi SDA
						<b>Kegiatan</b> : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	%	100	Kepala Bagian Administrasi SDA
						<b>Sub Kegiatan</b> :				



RPJM				RENSTRA						
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi SDA
						<b>Kegiatan</b> : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Energi dan Air	%	100	Kepala Bagian Administrasi SDA
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi SDA
					10 Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	
						<b>Program</b> : Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang dikoordinasikan	%	100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Ekonomi Mikro Kecil	%	100	Kepala Bagian Perekonomian
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian
					11 Terlaksananya Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Persentase Rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti oleh OPD	%	100	
						<b>Program</b> : Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian yang dikoordinasikan	%	100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase laporan TPID yang disampaikan tepat waktu	%	100	Kepala Bagian Perekonomian
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Pengendalian dan Distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian
					12 Meningkatnya Kesehatan Usaha BUMD		Persentase BUMD Sehat	%	WTP	
						<b>Program</b> : Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
						<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD sehat	%	100	Kepala Bagian Perekonomian
						<b>Sub Kegiatan</b> :				
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	4	Kasubbag Pembinaan BUMD
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	Kasubbag Pembinaan BUMD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	4	Kasubbag Pembinaan BUMD